PERAN ULAMA TERHADAP SIKAP POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH

Teuku Haris Munandar
NPP. 32.0048

Asdaf Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 32.0048@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dra. Karolina R.S. Wenggi, M.H.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Political participation in religious regions such as Bireuen Regency represents a complex phenomenon, closely tied to the central role of Islamic clerics (ulama). Religious identity, social inequality, and the dynamics of religion-based political parties shape a unique political space where ulama often stand at the intersection of moral and political interests.* ***Purpose:*** *This study aims to comprehensively analyze the political role of ulama in the local elections of Bireuen using six role dimensions: role expectation, role perception, role behavior, role performance, role conflict, and role ambiguity.* ***Methods:*** *This study employs a qualitative approach with a case study method to deeply explore the role of ulama in shaping the political attitudes of society in Bireuen Regency. Biddle's Role Theory (1986) serves as the analytical framework, covering six key dimensions: role expectation, role perception, role behavior, role performance, role conflict, and role ambiguity. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving seven purposively selected informants, including the head of MPU, academics, political actors, and community members. Data analysis was conducted inductively through stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing.* ***Results/Findings:*** *The findings reveal that ulama in Bireuen are perceived not only as spiritual leaders but also as political actors who influence voter alignment. While the public expects them to uphold political morality, in practice, role conflicts and ambiguities emerge due to pragmatic pressures and political affiliations.* ***Conclusion:*** *The political role of ulama in Bireuen's electoral politics is dynamic and multidimensional. As public expectations collide with political realities, ulama face significant challenges in maintaining a balance between moral authority and political engagement. This study recommends the formulation of a code of ethics governing ulama participation in politics to prevent social polarization and preserve trust in religious institutions.*

Keywords: Role of Ulama, Political Attitude, Bireuen Society, Islamic Politics

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Partisipasi politik masyarakat di daerah religius seperti Kabupaten Bireuen merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dilepaskan dari peran sentral para ulama. Identitas keagamaan, ketimpangan sosial, dan dinamika partai berbasis agama membentuk ruang politik yang unik, di mana ulama sering kali berada di persimpangan antara kepentingan moral dan politik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran politik ulama dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bireuen, menggunakan enam dimensi peran: *role expectation*, *role perception*, *role behavior*, *role performance*, *role conflict*, dan *role ambiguity*. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, bertujuan menggali secara mendalam peran ulama dalam membentuk sikap politik masyarakat di Kabupaten Bireuen. Teori peran dari Biddle (1986) digunakan sebagai kerangka analisis dengan enam dimensi utama*: role expectation, role perception, role behavior, role performance, role conflict, dan role ambiguity*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan kunci yang dipilih secara purposif, termasuk Ketua MPU, akademisi, tokoh partai, dan masyarakat. Analisis dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama di Bireuen tidak hanya diposisikan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga aktor politik yang memengaruhi arah dukungan pemilih. Terdapat ekspektasi tinggi dari masyarakat agar ulama tetap menjaga moralitas politik, namun pada praktiknya muncul ambiguitas dan konflik peran akibat tekanan pragmatis dan afiliasi politik tertentu. **Kesimpulan:** peran ulama dalam politik elektoral di Bireuen bersifat dinamis dan multidimensi. Ketika ekspektasi masyarakat bertemu dengan realitas politik, ulama menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara otoritas moral dan efektivitas politik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kode etik peran ulama dalam politik agar tidak terjadi polarisasi sosial dan krisis kepercayaan terhadap institusi keagamaan.

Kata Kunci: Peran Ulama, Sikap Politik, Masyarakat Bireuen, Politik Islam

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, termasuk dalam kehidupan politik (Pasal 28E Ayat 3), serta menjamin kebebasan beragama (Pasal 29 Ayat 1 dan 2). Jaminan ini membuka ruang partisipasi bagi aktor keagamaan, terutama ulama, dalam memengaruhi dinamika sosial dan politik di tingkat nasional maupun lokal. Peran ini tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga diperkuat melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Di Aceh, peran ulama dilembagakan secara formal melalui Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), menjadikan mereka sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi umat dan membentuk arah kebijakan berbasis nilai keislaman.

Konteks tersebut menjadi relevan secara khusus di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang dikenal sebagai "Kota Juang", dengan karakter masyarakat yang religius dan tradisi pendidikan Islam yang kuat. Ulama di Bireuen tidak hanya dihormati sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk sikap politik masyarakat, khususnya menjelang pemilihan umum. Partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 di Bireuen tercatat meningkat menjadi 82,84%, dibandingkan 77,27% pada Pemilu 2019 (RRI, 2024), sebuah

indikasi adanya dinamika politik yang tidak terlepas dari peran aktor keagamaan. Dalam konteks ini, ulama kerap menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan agenda-agenda politik kontemporer. Namun demikian, pengaruh politik ulama juga menghadapi tantangan yang kian kompleks. Masyarakat kini lebih terdidik, kritis, dan terpapar oleh berbagai informasi melalui media sosial. Perbedaan generasi menjadi salah satu tantangan utama, di mana generasi muda cenderung lebih rasional dan independen dalam bersikap terhadap politik, berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih patuh terhadap figur otoritatif keagamaan. Keterlibatan langsung ulama—terutama ulama muda—dalam politik praktis sering menimbulkan resistensi dan memunculkan dilema moral tentang netralitas serta kredibilitas ulama sebagai penjaga nilai keislaman.

Fenomena ini bukan tanpa preseden akademik. Hamayotsu (2011) mencatat bagaimana partai berbasis Islam seperti PKS memanfaatkan kaderisasi berbasis religiusitas untuk meraih dukungan politik. Sumaktoyo et al. (2016) mengonsepkan *paradoxical religiosity*, di mana pemilih Muslim memilih pemimpin religius secara personal, namun cenderung menolak simbolisme agama dalam politik. Sementara itu, Widian et al. (2023) dan Lussier & Ahnaf (2024) menyoroti penggunaan strategi populisme Islam dan netralisasi simbol-simbol keagamaan di ruang publik sebagai upaya mempertahankan dukungan elektoral. Tantangan politisasi agama juga diuraikan oleh Miichi (2014) dan Sumaktoyo (2021) yang menunjukkan polarisasi sosial akibat eksploitasi identitas etno-religius. Barton et al. (2021) menambahkan bahwa kontestasi narasi Islam progresif versus konservatif mencerminkan konflik antara nilai-nilai demokrasi dan aspirasi keagamaan. Dalam konteks lokal Aceh, Hasyim (2020) dan Nurrahmi (2022) menyebutkan bahwa peran ulama di lembaga seperti MPU atau MUI sering kali menjadi penentu arah kebijakan, termasuk dalam isu ekonomi syariah, moralitas publik, dan hukum pidana Islam. Namun, dari berbagai studi tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji peran strategis ulama dalam membentuk partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bireuen dalam konteks kontemporer khususnya dengan mempertimbangkan dinamika generasi muda, efek media sosial, dan kompleksitas peran ulama muda dalam politik elektoral. Sementara Fox & Menchik (2023) telah menyoroti kebutuhan akan representasi keagamaan yang etis dan reflektif, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam melihat bagaimana ulama tetap dapat menjadi penjaga moral politik tanpa kehilangan kepercayaan publik, serta bagaimana mereka dapat memainkan peran strategis yang proporsional dalam demokrasi lokal berbasis syariat Islam. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian ilmiah yang tidak hanya memotret posisi ulama secara deskriptif, tetapi juga menganalisis bagaimana mereka menavigasi ruang politik, membentuk opini publik, dan mempertahankan integritas moral di tengah tantangan modernitas dan transformasi sosial di Bireuen.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak membahas hubungan antara agama dan politik dalam konteks Indonesia, termasuk peran simbolisme keagamaan, populisme Islam, hingga representasi elite religius dalam sistem demokrasi. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Hamayotsu (2011) dan Miichi (2014) menyoroti pengaruh partai-partai Islam dan strategi mobilisasi berbasis religiusitas untuk memperoleh kekuasaan politik. Sementara itu, Sumaktoyo et al. (2016) dan Sumaktoyo (2021) menekankan adanya kontradiksi antara religiusitas individu dan penolakan terhadap dominasi simbol-simbol agama dalam kontestasi politik formal, yang mereka sebut sebagai *paradoxical religiosity*. Penelitian lain seperti Barton et al. (2021) dan Lussier & Ahnaf (2024) menelusuri perdebatan antara Islam konservatif dan Islam progresif serta tantangannya dalam ruang demokrasi Indonesia, khususnya dalam penggunaan nilai-nilai moral sebagai alat mobilisasi massa. Di sisi lain, studi oleh Widian et al. (2023) dan Fox & Menchik (2023) menyoroti pentingnya narasi religius yang lebih reflektif

dan etis dalam menjembatani kepentingan politik dengan prinsip-prinsip moral keagamaan. Seluruh studi tersebut memberikan landasan konseptual yang kuat tentang hubungan antara keagamaan dan politik dalam skala nasional. Di konteks lokal, beberapa penelitian seperti Hasyim (2020), Nurrahmi (2022) telah meneliti peran ulama dalam ruang kelembagaan formal seperti MPU Aceh, khususnya dalam merumuskan fatwa, pengawasan syariat, dan moral publik. Namun, fokus kajian tersebut lebih banyak diarahkan pada aspek kelembagaan dan kontribusi normatif ulama terhadap kebijakan daerah, bukan pada bagaimana figur ulama—baik yang bersifat tradisional maupun ulama muda—memengaruhi sikap politik masyarakat secara langsung dalam momen elektoral. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji peran strategis ulama di Kabupaten Bireuen dalam membentuk sikap politik masyarakat pada pemilu, khususnya dalam konteks keterlibatan generasi muda, pergeseran pola komunikasi akibat media sosial, serta dilema moral yang dihadapi ulama dalam ranah politik praktis. Padahal, Kabupaten Bireuen merupakan wilayah yang sangat religius dan historis, di mana otoritas ulama memainkan peran sosial yang penting dan kompleks. Kesenjangan ini semakin nyata apabila dibandingkan dengan penelitian Maulana (2022) yang meneliti politik identitas keagamaan dalam pemilu Ternate, namun tidak merefleksikan dinamika masyarakat syariat seperti Aceh. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian (research gap) dengan menganalisis bagaimana ulama di Bireuen memainkan peran strategis dalam membentuk opini politik masyarakat, menjaga kepercayaan publik, dan mempertahankan netralitas moral mereka di tengah tantangan politik elektoral. Penelitian ini juga mempertimbangkan perbedaan persepsi antargenerasi, kekuatan media sosial dalam membentuk opini, serta munculnya resistensi terhadap politisasi agama, yang hingga kini masih luput dari kajian akademik berbasis lokalitas Aceh.

1.3. Penelitian Terdahulu

Partisipasi politik masyarakat di daerah religius seperti Kabupaten Bireuen merupakan fenomena kompleks yang tidak bisa dilepaskan dari identitas keagamaan, ketimpangan sosial, serta pola mobilisasi partai politik berbasis agama. Studi Hamayotsu (2011) menunjukkan bahwa keberhasilan PKS dalam merekrut pemuda Muslim religius dipengaruhi oleh sistem kaderisasi meritokratis dan peluang politik pasca-otonomi daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika sistem politik membuka ruang bagi ekspresi keagamaan dalam bentuk institusional, seperti partai berbasis agama, maka partisipasi masyarakat meningkat karena adanya rasa memiliki dan peluang yang adil. Sementara itu, Karakoç dan Başkan (2012) menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi turut memperkuat kecenderungan masyarakat untuk melihat agama sebagai solusi politik. Mereka menemukan bahwa dalam kondisi ketimpangan yang tinggi, masyarakat cenderung mendukung peran agama dalam politik. Ini menjadi penting untuk konteks Bireuen, di mana sebagian warga yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap aktif secara politik dengan harapan adanya keadilan berbasis nilai-nilai Islam. Paradoks antara religiusitas pribadi dan religiusitas politik diungkap oleh Sumaktoyo et al. (2016), yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih kandidat yang religius secara pribadi, namun tidak menghendaki dominasi agama dalam kebijakan publik. Temuan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Muslim Indonesia, termasuk di Bireuen, mampu membedakan antara etika pribadi dan ranah publik, serta lebih rasional dalam menentukan pilihan politik. Sebaliknya, jika ekspresi keagamaan tidak tersalurkan secara demokratis, hal ini bisa melahirkan radikalisme sebagaimana dijelaskan oleh Abbas (2007) dalam studi tentang radikalisasi Islam di Inggris. Ia menyatakan bahwa ketimpangan sosial, alienasi politik, dan kegagalan institusi negara mengakibatkan munculnya ekstremisme. Dengan kata lain, ketika sistem demokrasi gagal mengakomodasi aspirasi religius, maka saluran partisipasi bisa bergeser ke arah non-demokratis. Hal ini memperkuat urgensi menjaga ruang demokratis yang inklusif bagi ekspresi keagamaan seperti di Bireuen.

Widian et al. (2023) menekankan bagaimana simbol dan retorika religius digunakan sebagai strategi populisme dalam kampanye di Indonesia. Strategi ini cukup efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat terutama di daerah dengan basis keagamaan kuat. Namun, Lussier dan Ahnaf (2024) memperingatkan bahwa ruang ibadah seringkali menjadi ajang politisasi, sehingga perlu upaya untuk menjaga netralitas tempat suci agar tidak kehilangan kepercayaan publik.

Dari sisi otoritas keagamaan, Hasyim (2020) menunjukkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki pengaruh besar dalam membentuk orientasi politik umat Islam. Hal ini berlaku di Aceh dan Bireuen yang menjadikan ulama sebagai sumber legitimasi politik. Partai Islam juga memanfaatkan ini melalui strategi kampanye yang terstruktur seperti dibahas oleh Fox dan Menchik (2023) yang meneliti praktik kampanye partai berbasis Islam di Indonesia. Selanjutnya, Sumaktoyo (2021) membuktikan bahwa sentimen etnis dan agama sangat berperan dalam menentukan pilihan politik, sebagaimana terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski berbeda konteks geografis, pendekatan berbasis identitas ini memiliki kemiripan dengan pola partisipasi politik masyarakat Bireuen. Hal ini diperkuat oleh temuan Barton et al. (2021) yang menyoroti kontestasi ide keislaman di Indonesia sebagai bagian dari dinamika antara demokrasi dan otoritarianisme. Khusus di Aceh, Nurrahmi (2022) mengungkap bahwa representasi syariah dalam media sangat memengaruhi persepsi publik. Dalam konteks ini, media berperan sebagai penghubung antara nilai keagamaan dan tindakan politik masyarakat. Peran partai lokal juga tidak kalah penting, sebagaimana ditunjukkan oleh Alqarni et al. (2024) yang meneliti kontribusi partai lokal dalam legislasi Qanun keuangan syariah di Aceh. Ini menunjukkan adanya relasi antara lokalitas, agama, dan kebijakan politik.

Dalam konteks yang lebih luas, Miichi (2014) mengkaji peran agama dan etnisitas dalam Pilkada Jakarta 2012 dan menemukan bahwa faktor identitas digunakan secara aktif dalam kampanye politik. Penemuan ini memberikan basis komparatif yang relevan bagi penelitian Anda untuk mengkaji bagaimana identitas agama digunakan secara strategis di Bireuen. Tren dua dekade terakhir yang memperlihatkan pergeseran dari populisme religius menuju populisme otoriter di Indonesia dikaji oleh Hidayah et al. (2025). Mereka mengingatkan bahwa dalam masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi, figur yang menggabungkan simbol agama dan gaya otoriter lebih mudah mendapatkan legitimasi. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas bukan hanya memobilisasi suara, tapi juga membentuk struktur kepemimpinan yang diterima masyarakat. Sebagai referensi lokal, Arif dan Mulyana (2020) memaparkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Ternate. Studi ini memperlihatkan bahwa partisipasi yang rendah disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran politik. Namun, faktor pendorong seperti afiliasi politik keluarga dan pengalaman organisasi menunjukkan bahwa jaringan sosial tetap berperan besar. Ini memberikan dasar perbandingan yang baik untuk melihat bagaimana perbedaan pendekatan politik dan keagamaan dapat memengaruhi partisipasi masyarakat di daerah seperti Bireuen.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengulas keterkaitan antara agama, identitas, dan partisipasi politik masyarakat dalam konteks demokrasi. Hamayotsu (2011) menyoroti peran kaderisasi partai Islam dalam memobilisasi pemuda religius; sementara Karakoç dan Başkan (2012) serta Sumaktoyo et al. (2016) menekankan pengaruh ketimpangan ekonomi dan paradoks antara religiusitas personal dan politik terhadap perilaku pemilih. Di sisi lain, Abbas (2007) menyoroti potensi radikalisasi akibat kegagalan negara mengakomodasi identitas keagamaan. Rangkaian studi lainnya—baik yang fokus pada pemilu di Indonesia seperti oleh Miichi (2014), Sumaktoyo (2021), Fox & Menchik (2023), hingga dinamika populisme otoriter seperti Hidayah et al. (2025)—menunjukkan bahwa agama telah menjadi faktor penentu dalam

pembentukan preferensi politik masyarakat di berbagai wilayah. Namun, dari seluruh penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan kajian yang secara spesifik mengangkat dinamika partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, yang memiliki karakteristik unik sebagai daerah syariat Islam, dengan struktur sosial-keagamaan yang sangat kuat. Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam dua hal utama. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan perspektif religiusitas masyarakat lokal dengan pendekatan partisipasi politik kontemporer dalam Pilkada, sehingga mampu melihat bagaimana nilai-nilai agama tidak hanya berfungsi sebagai identitas normatif, tetapi juga sebagai faktor struktural yang membentuk motivasi, sikap, dan keputusan politik masyarakat. Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menyoroti pengaruh jaringan sosial berbasis keagamaan, termasuk pengaruh tokoh agama lokal, kelompok pengajian, dan lembaga keislaman terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak fokus pada partai, elite, atau sentimen agama secara makro. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah baik dari sisi konteks wilayah yang belum banyak dijelajahi secara ilmiah (yaitu Kabupaten Bireuen) maupun pendekatan analisis yang mengaitkan antara partisipasi politik, identitas keagamaan, dan mobilisasi berbasis kultur lokal. Kebaruan ini diharapkan dapat memperkaya kajian politik elektoral di wilayah religius serta menjadi masukan penting bagi perumusan strategi peningkatan partisipasi politik yang lebih inklusif dan kontekstual.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam Peran Ulama Terhadap Sikap Politik Masyarakat Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

II METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran ulama memengaruhi sikap politik masyarakat di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna subjektif, realitas sosial yang kompleks, serta interaksi antara ulama dan masyarakat dalam konteks sosial-keagamaan yang khas tanpa manipulasi variabel. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurdin dan Hartati (2019), pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat interpretif yang menekankan eksplorasi dan penafsiran secara holistik terhadap fenomena sosial. Penelitian ini menggunakan Teori Peran dari Biddle (1986) sebagai landasan utama dalam menganalisis dinamika hubungan antara ekspektasi masyarakat, persepsi ulama, dan perilaku aktual dalam menjalankan peran mereka. Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana ulama, sebagai aktor religius dan sosial-politik, berperan dalam membentuk orientasi politik masyarakat di wilayah yang sangat religius seperti Kabupaten Bireuen.

Adapun enam dimensi utama dari teori ini yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Peran yang Diharapkan (Role Expectations) – mencakup harapan masyarakat terhadap ulama dalam menyampaikan panduan moral dan politik berdasarkan nilai agama.
2. Persepsi Peran (Role Perceptions) – menggambarkan bagaimana ulama memahami tanggung jawab dan batasan mereka dalam ranah politik.
3. Perilaku Peran (Role Behavior) – mencerminkan tindakan nyata ulama dalam aktivitas politik, seperti ceramah bertema politik atau dukungan terhadap kandidat.
4. Kinerja Peran (Role Performance) – menilai keberhasilan ulama dalam membimbing pilihan politik masyarakat serta dampaknya terhadap kepercayaan publik.
5. Konflik Peran (Role Conflict) – mengeksplorasi dilema yang dihadapi ulama ketika nilai keagamaan bertabrakan dengan tekanan politik.

6. Ambiguitas Peran (Role Ambiguity) – mencerminkan ketidakjelasan posisi ulama dalam politik, baik di mata mereka sendiri maupun masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, publikasi, dan peraturan terkait peran ulama dan politik lokal di Aceh.

Penelitian ini melibatkan tujuh orang informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yaitu:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen
2. Pengamat politik
3. Dosen Ilmu Politik Universitas Almuslim
4. Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen
5. Pemuda atau mahasiswa yang aktif berinteraksi dengan ulama
6. Warga berusia 40–60 tahun yang rutin menghadiri pengajian atau khutbah Jumat
7. Ketua MPW Partai Adil Sejahtera Kabupaten Bireuen

Dari keseluruhan informan, informan kunci adalah Ketua MPU Kabupaten Bireuen, karena posisinya yang strategis sebagai pemimpin lembaga keulamaan resmi yang memiliki otoritas moral dan sosial tinggi dalam masyarakat. Ketua MPU dinilai memiliki pandangan komprehensif tentang peran ulama, baik secara normatif maupun praktis, serta dapat menjelaskan dinamika persepsi masyarakat terhadap keterlibatan ulama dalam politik. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, alat observasi, catatan lapangan, dan alat perekam suara. Peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan informan dan menganalisis data berdasarkan konteks sosial dan budaya lokal (Simangunsong, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Observasi, untuk mengamati aktivitas keagamaan dan sosial yang berkaitan dengan peran ulama.
- Wawancara mendalam, untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi para informan.
- Dokumentasi, sebagai pelengkap untuk memvalidasi temuan dan memperkaya konteks analisis.

Penelitian dilaksanakan selama dua minggu pada awal Januari 2025 di wilayah Kabupaten Bireuen. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik masyarakatnya yang religius dan memiliki tradisi panjang dalam menghormati peran ulama dalam kehidupan publik. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pola-pola sosial yang muncul secara alami di lapangan serta menafsirkan makna peran ulama dalam memengaruhi sikap politik masyarakat secara kontekstual dan mendalam.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Role Expectations*

Peran ulama dalam masyarakat Kabupaten Bireuen memiliki akar historis dan kultural yang mendalam. Ulama tidak hanya dipandang sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai panutan moral dan penjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks politik lokal, ekspektasi masyarakat terhadap ulama sangat tinggi, khususnya dalam hal menjaga netralitas, memberikan panduan moral yang adil, serta menjadi pengarah nilai-nilai keislaman dalam memilih pemimpin.

Dimensi *Role Expectations* dalam Teori Peran (Biddle, 1986) sangat relevan dalam menjelaskan fenomena ini. Dimensi ini menekankan bagaimana harapan sosial yang

dibebankan kepada seseorang atau kelompok dalam menjalankan perannya memengaruhi perilaku dan respons yang muncul. Dalam hal ini, masyarakat Bireuen mengharapkan ulama tidak terlibat langsung dalam politik praktis, melainkan berfungsi sebagai penyejuk dan pemberi rambu-rambu normatif berdasarkan prinsip Islam.

Harapan ini mencerminkan keinginan masyarakat agar ulama bersikap adil, tidak berpihak, dan tetap menjadi sumber moralitas publik di tengah kontestasi politik. Masyarakat ingin agar mimbar keagamaan digunakan untuk menanamkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, dan amanah, bukan untuk mendukung kandidat tertentu. Ekspektasi ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran kritis, khususnya di kalangan generasi muda yang mulai menilai keterlibatan politik ulama secara lebih objektif.

Oleh karena itu, peran ulama di Bireuen dalam dimensi ini bukan hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi acuan penting dalam pembentukan sikap politik masyarakat. Ketika ulama mampu menjaga netralitas dan tetap fokus pada fungsi edukatif-religius, maka legitimasi sosial mereka tetap kuat. Sebaliknya, jika mereka terlalu masuk ke dalam ranah politik praktis, akan muncul resistensi dari sebagian masyarakat yang menilai ulama telah melampaui batas peran idealnya.

Dengan demikian, ekspektasi peran yang tinggi terhadap ulama di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa masyarakat mendambakan figur keagamaan yang independen secara politik, namun aktif secara moral dan spiritual dalam memberikan bimbingan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini menegaskan pentingnya posisi ulama sebagai penjaga integritas sosial dalam masyarakat yang religius dan politis secara bersamaan.

3.2 *Role Perceptions*

Dalam memahami posisi dan fungsi ulama dalam ranah politik lokal, khususnya di Kabupaten Bireuen, penting untuk meninjau bagaimana ulama dan masyarakat memaknai peran tersebut secara subjektif. Dimensi role perceptions dalam teori peran Biddle (1986) mengacu pada persepsi atau pemahaman individu maupun kelompok terhadap peran sosial yang seharusnya mereka jalankan, baik berdasarkan harapan internal (diri sendiri) maupun eksternal (lingkungan sosial). Dalam konteks Kabupaten Bireuen, persepsi terhadap peran ulama tidak tunggal, melainkan terbagi ke dalam dua arus besar yang berkembang secara bersamaan: persepsi terhadap ulama tradisional dan ulama modern. Ulama tradisional atau yang berasal dari institusi dayah cenderung memosisikan diri sebagai pembimbing moral dan spiritual semata. Mereka berhati-hati dalam menyampaikan pendapat politik secara eksplisit karena khawatir hal tersebut dapat mengaburkan fungsi utama mereka sebagai penjaga nilai dan etika masyarakat. Dalam persepsi ini, keterlibatan ulama dalam politik praktis dianggap berisiko terhadap integritas moral yang mereka emban. Berbeda halnya dengan ulama yang tergolong modern, terutama yang aktif di media sosial atau memiliki akses luas terhadap pendidikan tinggi. Ulama kelompok ini memaknai peran mereka tidak hanya terbatas pada ruang spiritual, tetapi juga sebagai aktor yang sah dalam arena politik. Bagi mereka, menyampaikan pandangan politik adalah bagian dari tanggung jawab intelektual dan moral, selama masih dalam koridor nilai-nilai Islam. Tidak sedikit dari ulama modern ini yang terjun langsung dalam kontestasi politik sebagai calon legislatif atau pemimpin daerah. Persepsi ini menekankan bahwa ulama juga memiliki peran strategis dalam mengarahkan umat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan prinsip keislaman. Persepsi masyarakat terhadap peran ulama pun terbentuk melalui dua jalur utama: warisan sejarah Islam di Aceh dan perbedaan gaya kepemimpinan ulama.

Secara historis, ulama memiliki posisi penting dalam sejarah perjuangan Aceh, termasuk dalam bidang politik. Peran-peran seperti yang dilakukan oleh Teungku Chik di Tiro telah melekatkan citra ulama sebagai pemimpin umat dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Warisan ini masih membekas dalam kesadaran kolektif masyarakat Bireuen, sehingga

keterlibatan ulama dalam politik tidak serta-merta dianggap negatif. Namun demikian, konteks sosial-politik masa kini telah melahirkan dinamika baru dalam persepsi masyarakat. Masyarakat modern, khususnya generasi muda, lebih kritis dan selektif dalam menyikapi pandangan ulama yang terlalu politis. Meskipun nilai-nilai Islam tetap menjadi fondasi kehidupan mereka, ada kecenderungan untuk menuntut ulama agar tetap menjaga netralitas dan menghindari afiliasi politik yang eksplisit. Masyarakat tidak menolak keterlibatan ulama dalam isu-isu kebangsaan, namun menginginkan agar posisi ulama tetap berada di atas semua golongan, sebagai penuntun yang menyatukan, bukan justru memecah belah. Dengan demikian, persepsi terhadap peran ulama dalam politik di Kabupaten Bireuen tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pendidikan, cara berdakwah, kedekatan sosial dengan komunitas, serta pengaruh sejarah lokal. Ulama yang mampu menempatkan diri sebagai pembimbing normatif dan tetap menjaga marwah keulamaan mereka, cenderung mendapatkan legitimasi sosial yang kuat. Sebaliknya, ulama yang terlalu berpihak secara terang-terangan kepada aktor politik tertentu berpotensi kehilangan kepercayaan, terutama dari generasi yang menuntut independensi dan integritas moral yang tinggi dari tokoh agama. Dalam konteks ini, dimensi role perceptions memperlihatkan adanya ketegangan antara warisan historis yang mengafirmasi keterlibatan ulama dalam politik, dengan tuntutan modernitas yang menginginkan ulama bersikap netral dan fokus pada pembinaan moral. Persepsi ini mencerminkan perubahan orientasi masyarakat terhadap peran ulama dalam kehidupan politik, seiring dengan semakin terbukanya akses informasi dan meningkatnya kesadaran demokratis.

3.3 *Role Behavior*

Dimensi *role behavior* dalam teori peran menekankan pada tindakan nyata yang dilakukan oleh aktor sosial dalam menjalankan peran yang diasumsikan atau diharapkan darinya. Dalam konteks ulama di Kabupaten Bireuen, perilaku politik mereka menjadi indikator sejauh mana mereka memahami dan merespons persepsi masyarakat serta harapan sosial yang melekat pada posisi keulamaan. Perilaku ulama dalam konteks politik di Bireuen dapat dilihat dari cara mereka menyampaikan nasihat keagamaan, arah ceramah, simbolisme dalam keterlibatan sosial-politik, hingga keberpihakan eksplisit atau implisit terhadap kandidat politik tertentu. Tindakan-tindakan ini secara nyata menjadi cerminan peran politik yang dimainkan oleh ulama, baik sebagai penjaga nilai-nilai moral masyarakat maupun sebagai aktor yang memiliki pengaruh elektoral dalam pemilu lokal. Secara umum, ulama di Bireuen masih memiliki posisi strategis dalam memengaruhi perilaku politik masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas keagamaan seperti dayah. Dalam situasi ini, rekomendasi atau isyarat politik dari seorang ulama yang memiliki reputasi keilmuan tinggi atau jaringan sosial yang luas dapat menjadi acuan penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Ini menunjukkan bahwa perilaku politik ulama, bahkan yang bersifat simbolik seperti kehadiran dalam acara kampanye atau menyampaikan pesan moral yang mengarah pada kandidat tertentu, tetap memiliki bobot elektoral. Namun, dinamika sosial dan tingkat literasi politik masyarakat Bireuen mengalami perubahan signifikan, terutama di kalangan generasi muda. Masyarakat semakin kritis dan tidak lagi menerima begitu saja pesan-pesan politik yang disampaikan oleh ulama, terlebih jika dinilai memiliki afiliasi politik yang kuat. Dalam konteks ini, perilaku ulama yang dinilai terlalu vulgar dalam menyampaikan dukungan kepada kandidat atau terlibat aktif dalam politik praktis dapat menimbulkan resistensi. Generasi muda khususnya lebih menghargai ulama yang bersikap netral, konsisten dengan nilai-nilai keagamaan, serta menjaga jarak dari kepentingan politik partisan. Fenomena ini mencerminkan bahwa pengaruh ulama dalam politik bukan lagi bersifat absolut sebagaimana masa lalu. Ulama tetap dihormati sebagai pembimbing moral, tetapi kepercayaan publik kini sangat dipengaruhi oleh integritas personal, netralitas, serta kesesuaian antara ucapan dan tindakan.

Dalam situasi politik yang kompleks, ulama yang menyampaikan nasihat secara normatif—seperti menyerukan pemilihan pemimpin yang adil, amanah, dan bertakwa—cenderung lebih dihormati dan didengarkan daripada ulama yang terang-terangan mendukung salah satu pihak politik. Tingkat keberterimaan masyarakat terhadap perilaku politik ulama juga sangat ditentukan oleh konteks sosial masing-masing. Di lingkungan yang kental dengan tradisi keagamaan, peran ulama sebagai penentu arah politik masyarakat masih relatif kuat. Sebaliknya, di kawasan urban atau di kalangan terdidik, pengaruh ini cenderung melemah dan bergeser ke arah rasionalitas politik berbasis visi-misi dan rekam jejak kandidat. Dalam kerangka *role behavior*, hal ini menunjukkan adanya dinamika antara ekspektasi sosial terhadap peran ulama dan respons aktual yang ditunjukkan oleh para ulama itu sendiri. Ulama yang berhasil menyeimbangkan antara peran historis mereka sebagai pembela kebenaran dan moralitas dengan tuntutan modernitas yang menuntut netralitas, akan lebih mampu mempertahankan legitimasi dan pengaruhnya di tengah masyarakat. Sebaliknya, perilaku politik yang menunjukkan afiliasi yang terlalu eksplisit dengan partai atau kandidat tertentu berisiko menurunkan kepercayaan publik, bahkan bisa menjadi kontraproduktif bagi reputasi keulamaan yang telah dibangun. Oleh karena itu, *role behavior* ulama dalam politik Bireuen harus dijalankan secara cermat, dengan mempertimbangkan sensitivitas sosial, ekspektasi masyarakat, serta kebutuhan akan keseimbangan antara peran sebagai tokoh moral dan aktor publik. Perilaku yang mengedepankan etika dakwah, inklusivitas, serta konsistensi nilai akan lebih mampu menjawab tantangan sosial-politik saat ini, dibandingkan perilaku yang cenderung partisan atau transaksional.

3.4 *Role Performance*

Dimensi *role performance* merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan aktor sosial dalam menjalankan perannya. Dalam konteks ulama, *role performance* berkaitan erat dengan sejauh mana tindakan dan pengaruh mereka dalam bidang politik dinilai efektif oleh masyarakat. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan ulama dalam meningkatkan kesadaran politik, pengaruh terhadap perilaku politik generasi muda, hingga efektivitas penggunaan media dakwah seperti ceramah, khutbah, dan pengajian sebagai sarana komunikasi moral-politik Di Kabupaten Bireuen, peran ulama sebagai pembimbing moral dalam politik masih mendapatkan tempat di hati masyarakat, terutama dalam lingkungan yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ulama yang mampu menyampaikan pesan-pesan politik secara halus, bijak, dan tidak memihak dinilai lebih efektif dalam membentuk sikap politik masyarakat. Pesan-pesan seperti pentingnya memilih pemimpin yang jujur, adil, dan anti-korupsi masih memiliki kekuatan untuk menggugah kesadaran politik masyarakat, terutama ketika disampaikan dalam konteks keagamaan yang familiar seperti khutbah Jumat atau pengajian rutin Namun demikian, seiring dengan meningkatnya akses informasi dan perubahan pola pikir, terutama di kalangan generasi muda, efektivitas peran ulama mengalami tantangan. Generasi muda cenderung lebih mandiri dan kritis dalam menentukan pilihan politik. Mereka tidak serta-merta mengikuti arahan ulama, melainkan menilai kredibilitas, konsistensi, dan cara penyampaian pesan dari tokoh agama tersebut. Ulama yang terlalu eksplisit dalam menyampaikan dukungan politik atau menunjukkan keberpihakan yang jelas cenderung kehilangan pengaruh, karena dianggap menyalahgunakan otoritas keagamaannya untuk kepentingan politik praktis Oleh karena itu, kinerja ulama dalam memengaruhi masyarakat sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan.

Pendekatan yang bersifat inklusif, edukatif, dan reflektif dinilai lebih berhasil dalam membangun kesadaran politik yang sehat dan beretika. Ulama yang menggunakan ceramah dan khutbah sebagai media penyampaian nilai-nilai politik secara universal dan tidak tendensius—seperti menolak politik uang, mendorong partisipasi dalam pemilu, serta

menekankan pentingnya integritas pemimpin—mampu mempertahankan peran sentral mereka dalam kehidupan publik. Ceramah dan khutbah tetap menjadi sarana komunikasi yang strategis, terutama bagi kalangan masyarakat usia menengah dan lanjut yang lebih terikat pada nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Media ini tidak hanya digunakan untuk menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menjadi kanal penting dalam membentuk opini publik dan sikap politik secara tidak langsung. Dengan demikian, efektivitas peran politik ulama sangat terkait dengan kualitas penyampaian pesan dan relevansinya terhadap situasi politik kontemporer Dalam evaluasi kinerja peran ulama di Bireuen, terlihat bahwa ulama yang mempertahankan integritas, bersikap netral, dan konsisten dalam nilai moral lebih dihormati dan berpengaruh. Sebaliknya, ulama yang menunjukkan keterlibatan berlebihan dalam politik partisan atau menyampaikan ceramah yang bernuansa provokatif cenderung ditinggalkan, terutama oleh kalangan muda yang menuntut transparansi dan objektivitas dalam kehidupan public Dengan demikian, dimensi *role performance* menunjukkan bahwa keberhasilan ulama dalam memainkan peran politik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar pengaruh mereka, tetapi juga oleh cara dan kualitas pengaruh tersebut. Dalam masyarakat yang semakin terbuka dan kritis seperti Bireuen, ulama dituntut untuk menjadi pendidik moral-politik yang cerdas, komunikatif, dan relevan, bukan sekadar simbol otoritas agama yang digunakan untuk mobilisasi kepentingan elektoral jangka pendek.

3.5 *Role Conflict*

Dalam struktur sosial masyarakat yang religius seperti Kabupaten Bireuen, ulama memiliki posisi yang strategis sebagai pemegang otoritas moral dan rujukan spiritual. Namun, posisi ini kerap kali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama ketika bersinggungan dengan dunia politik praktis. Dimensi *role conflict* menjelaskan ketegangan peran yang dialami ulama ketika mereka dituntut untuk tetap menjaga netralitas dan integritas keagamaan, namun pada saat yang sama dihadapkan pada ekspektasi, tekanan, bahkan godaan untuk terlibat secara langsung dalam kontestasi politik. Konflik peran ini sering kali muncul karena tidak adanya batas yang tegas antara ruang keagamaan dan ruang politik. Ketika ulama secara eksplisit menunjukkan keberpihakan atau kedekatan dengan tokoh atau partai politik tertentu, muncul risiko distorsi peran. Ulama yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga nilai dan penengah dalam konflik, justru bisa terperangkap dalam arus polarisasi politik yang tajam. Hal ini tidak hanya memengaruhi citra dan legitimasi pribadi mereka, tetapi juga dapat memicu ketegangan horizontal dalam masyarakat, seperti konflik antarindividu maupun antar komunitas dengan latar belakang pilihan politik yang berbeda Di tengah dinamika masyarakat yang semakin cerdas dan kritis, keterlibatan ulama dalam politik praktis juga sering kali menimbulkan persepsi negatif. Banyak masyarakat yang menilai bahwa ulama seharusnya menjadi penjaga jarak dari kekuasaan, bukan menjadi bagian dari mesin politik. Ketika ulama turun langsung dalam mendukung kandidat tertentu, pesan-pesan moral yang mereka sampaikan bisa kehilangan bobot etiknya dan dicurigai sebagai bagian dari strategi kampanye. Akibatnya, peran ulama sebagai sumber pencerahan dan penjaga etika publik dapat mengalami delegitimasi di mata masyarakat, khususnya generasi muda yang cenderung lebih rasional dan otonom dalam menentukan sikap politik Lebih jauh, konflik peran ulama juga berdampak pada struktur sosial masyarakat.

Dalam konteks pemilu, misalnya, dukungan ulama terhadap calon tertentu bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan kekeluargaan, komunitas lokal, atau jamaah masjid. Ketika satu kelompok mengikuti pandangan politik seorang ulama, sementara kelompok lain memiliki preferensi berbeda, ketegangan ini dapat mengancam keharmonisan sosial. Bahkan ketika konflik tersebut tidak bermuara pada kekerasan fisik, gesekan sosial tetap dapat terjadi dalam bentuk penurunan kepercayaan, perdebatan emosional, dan pengotakan komunitas Maka dari itu, menjaga netralitas dan independensi menjadi kunci dalam menghindari konflik peran.

Ulama yang tetap berdiri di atas semua golongan politik dan fokus pada penyampaian nilai-nilai moral universal seperti kejujuran, keadilan, dan anti-korupsi, cenderung lebih dihormati dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dalam posisi ini, ulama dapat berperan sebagai jembatan antar-kelompok dan menjadi pengayom yang mampu meredam potensi konflik sosial yang timbul akibat perbedaan pilihan politik Dengan demikian, dimensi *role conflict* memperlihatkan bahwa ulama menghadapi dilema antara menjaga kemurnian peran keagamaan dan menanggapi realitas politik di masyarakat. Ketika ulama mampu memainkan peran sebagai otoritas moral yang independen, mereka tidak hanya memperkuat posisi sosialnya tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial-politik yang sehat. Sebaliknya, keterlibatan yang terlalu dalam dalam politik praktis berpotensi melemahkan posisi tawar mereka sebagai pemimpin moral dan dapat merusak jaringan kepercayaan sosial yang telah dibangun selama ini.

3.6 *Role Ambiguity*

Ambiguitas peran (*role ambiguity*) merupakan kondisi di mana tidak terdapat kejelasan mengenai tugas, batasan, atau ekspektasi yang melekat pada suatu peran sosial tertentu. Dalam konteks ulama di Kabupaten Bireuen, ambiguitas ini menjadi persoalan signifikan ketika batas antara peran keagamaan dan keterlibatan dalam politik praktis menjadi kabur. Ulama tidak hanya diposisikan sebagai pembimbing spiritual, tetapi juga kerap muncul dalam ranah politik, baik secara eksplisit maupun implisit. Hal ini menciptakan ketidakjelasan yang berdampak luas, baik bagi posisi ulama sendiri maupun bagi persepsi masyarakat terhadap mereka. Salah satu penyebab utama ambiguitas ini adalah tidak adanya pedoman yang tegas dan seragam mengenai sejauh mana ulama dapat berpartisipasi dalam politik praktis. Meskipun di Aceh telah dibentuk lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan memiliki qanun sebagai landasan normatif, interpretasi terhadap aturan tersebut masih beragam. Dalam praktiknya, sebagian ulama bersikap netral, sementara yang lain menunjukkan keberpihakan politik, bahkan mencalonkan diri dalam kontestasi politik. Ketidakkonsistenan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kejelasan identitas peran ulama: apakah mereka berbicara atas nama agama, pribadi, lembaga keulamaan, atau kepentingan politik tertentu?. Ketidakjelasan ini kemudian tercermin dalam kebingungan masyarakat, terutama ketika mereka menyaksikan ulama menyampaikan ceramah moral di mimbar, namun juga terlibat dalam aktivitas politik secara terbuka. Masyarakat menjadi sulit membedakan mana pesan yang benar-benar bersumber dari nilai-nilai keagamaan dan mana yang berisi muatan politis tersembunyi. Dalam situasi ini, muncul persepsi bahwa pesan-pesan spiritual yang disampaikan telah terkontaminasi oleh kepentingan tertentu. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap ulama dapat tergerus secara perlahan, terutama di kalangan generasi muda yang memiliki pola pikir lebih kritis dan rasional. Ambiguitas peran juga memperlemah posisi ulama sebagai penjaga etika dan moral publik.

Dalam kondisi yang ideal, ulama berfungsi sebagai penengah yang objektif dan netral dalam menghadapi dinamika sosial-politik. Namun, ketika sikap dan peran mereka tidak jelas, masyarakat mulai meragukan integritas moral mereka. Inkonsistensi antara nasihat keagamaan yang disampaikan dan tindakan yang dilakukan oleh ulama dapat memperkuat persepsi publik bahwa ulama telah menjadi bagian dari permainan kekuasaan, bukan lagi pemegang nilai-nilai transenden. Lebih lanjut, ambiguitas peran ini memunculkan potensi terjadinya erosi kepercayaan publik terhadap institusi keulamaan itu sendiri. Ketika masyarakat tidak memiliki kejelasan mengenai orientasi peran seorang ulama, maka legitimasinya sebagai panutan spiritual pun mulai dipertanyakan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak otoritas moral ulama dan menjauhkan mereka dari posisi strategis sebagai pemersatu sosial. Bagi masyarakat yang lebih terpelajar, ambiguitas ini dapat menjadi alasan untuk tidak lagi menjadikan ulama sebagai referensi utama dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Dengan demikian,

ambiguitas peran merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh ulama di Kabupaten Bireuen. Ketidakjelasan antara peran keagamaan dan politik dapat merusak citra ulama, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, serta melemahkan kapasitas mereka sebagai penjaga nilai-nilai etika publik. Untuk mengatasi hal ini, ulama perlu secara sadar menjaga kejelasan peran dan batasan yang dimilikinya. Transparansi sikap, konsistensi antara pesan dan tindakan, serta komitmen untuk tidak menjadikan agama sebagai alat legitimasi politik menjadi langkah penting agar ulama tetap dihormati dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menyoroti secara mendalam bagaimana ulama memainkan peran politik dalam konteks lokal Kabupaten Bireuen, Aceh, melalui pendekatan enam dimensi peran: *role expectation*, *role perception*, *role behavior*, *role performance*, *role conflict*, dan *role ambiguity*. Kompleksitas ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa Bireuen merupakan daerah religius, di mana identitas keagamaan menjadi unsur utama dalam pembentukan sikap politik masyarakat. Dinamika ini sejalan dengan temuan Hamayotsu (2011) yang menyatakan bahwa partai berbasis agama seperti PKS berhasil mengkapitalisasi identitas keagamaan masyarakat melalui kaderisasi dan peluang politik pasca-otonomi daerah. Ini memperkuat dimensi *role expectation*, di mana masyarakat mengharapkan ulama sebagai pemandu politik berbasis moralitas Islam. Namun demikian, di balik ekspektasi tersebut terdapat ketimpangan sosial yang menyebabkan masyarakat semakin menggantungkan harapan pada tokoh agama. Hal ini selaras dengan studi Karakoç dan Başkan (2012) yang menunjukkan bahwa dalam kondisi ekonomi tidak setara, agama seringkali dijadikan jalan keluar politik. Dengan kata lain, masyarakat Bireuen tidak hanya mengharapkan ulama sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penyambung aspirasi sosial-ekonomi melalui jalur politik. Hal ini mempertegas ambivalensi dalam *role perception* dan *role behavior* ulama: antara mengedepankan otoritas moral atau merespons tekanan pragmatis dari masyarakat yang mencari keadilan sosial. Lebih jauh, *role behavior* ulama dalam politik di Bireuen ternyata juga menunjukkan polarisasi: sebagian aktif mendukung kandidat, bahkan terlibat dalam kampanye, sementara yang lain memilih bersikap netral. Ini memperlihatkan adanya perbedaan persepsi internal dalam komunitas ulama itu sendiri. Seperti diungkap oleh Sumaktoyo et al. (2016), masyarakat Muslim Indonesia menunjukkan preferensi pada kandidat yang religius secara pribadi namun tidak menginginkan dominasi agama dalam kebijakan publik. Fenomena ini tampak nyata di Bireuen, di mana masyarakat bisa saja mendukung ulama sebagai individu, namun akan bersikap kritis jika ulama secara terang-terangan menggunakan mimbar dakwah untuk kepentingan politik. Kritik terhadap *role performance* ulama di Bireuen semakin menguat ketika kepercayaan publik terganggu oleh tindakan yang tidak konsisten dengan nilai-nilai moral Islam. Seperti dalam studi Lussier dan Ahnaf (2024), tempat ibadah menjadi ruang politisasi, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan. Dalam konteks ini, peran ulama sebagai penjaga moral justru terancam jika tidak mampu menjaga batas-batas etik antara agama dan politik. Apalagi ketika politisasi ini dilakukan dalam ruang ibadah atau dalam rangkaian keagamaan yang sakral, maka kredibilitas moral ulama dapat tergeser oleh persepsi kepentingan politik. Ketegangan antara idealisme dan realitas politik turut membentuk *role conflict* dalam diri ulama. Sebagian merasa harus menjaga jarak demi mempertahankan kehormatan keulamaan, sementara yang lain tergoda oleh panggung politik. Fenomena ini pernah dijelaskan oleh Abbas (2007) yang mengingatkan bahwa ketika ekspresi keagamaan tidak difasilitasi secara demokratis, hal ini dapat mendorong kemunculan radikalisme atau ekstremisme. Walaupun tidak sampai pada titik ekstrem di Bireuen, ketegangan ini tetap relevan karena memperlihatkan bahwa ruang partisipasi yang tidak dikelola secara etis dapat merusak tatanan sosial dan menjauhkan ulama dari fungsi utamanya sebagai pemersatu. Fenomena ambiguitas peran (*role ambiguity*) juga diperparah

oleh absennya regulasi atau etika politik yang mengatur batas peran ulama. Dalam kajian Hasyim (2020), fatwa MUI sangat memengaruhi orientasi politik masyarakat, namun ketika fatwa atau seruan agama dibajak oleh aktor politik, maka terjadi kebingungan di tingkat akar rumput. Hal ini dialami di Bireuen ketika sebagian ulama menjadikan mimbar khutbah sebagai sarana kampanye terselubung, menciptakan kesan bahwa agama telah menjadi alat politik, bukan lagi sebagai pencerah.

Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat terhadap ulama mulai terfragmentasi, terutama di kalangan muda yang lebih kritis dan terbuka terhadap informasi digital. Penelitian Widian et al. (2023) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa simbol-simbol religius sering dimanfaatkan sebagai strategi populisme dalam kampanye, khususnya di daerah berbasis agama seperti Aceh. Namun, strategi ini rawan menciptakan ekspektasi berlebihan terhadap tokoh agama, yang jika tidak terpenuhi justru menjadi bumerang dalam *role performance* mereka. Di sisi lain, penelitian Fox dan Menchik (2023) menunjukkan bagaimana partai-partai Islam memanfaatkan struktur sosial dan tokoh agama sebagai jaringan kampanye yang sistematis, terutama dalam konteks lokal seperti Bireuen. Dalam konteks identitas, temuan Sumaktoyo (2021) dan Miichi (2014) memperlihatkan bahwa faktor agama dan etnis menjadi elemen kuat dalam kontestasi elektoral. Hal ini semakin relevan ketika melihat realitas sosial Bireuen yang homogen secara keagamaan tetapi beragam secara afiliasi politik. Dengan demikian, ketika ulama berpihak secara politis, maka potensi konflik sosial meningkat karena mencederai simbol persatuan yang selama ini melekat pada figur keulamaan. Dari sisi kelembagaan, penelitian Nurrahmi (2022) dan Alqarni et al. (2024) menunjukkan bahwa media dan partai lokal di Aceh menjadi instrumen penting dalam membentuk opini publik dan kebijakan berbasis syariah. Namun, jika ulama tidak memiliki literasi media dan politik yang memadai, maka mereka justru rentan dipolitisasi atau bahkan kehilangan kontrol atas pesan-pesan keagamaannya. Ini memperkuat pentingnya memperjelas *role perception* dan memberikan pendidikan politik yang sehat kepada tokoh agama. Lebih luas lagi, Hidayah et al. (2025) mengingatkan bahwa populisme religius bisa bertransformasi menjadi populisme otoriter jika tidak dikendalikan. Dalam konteks ini, ulama yang memadukan simbol agama dengan gaya komunikasi otoriter justru berpotensi menyingkirkan nilai-nilai demokrasi dan dialog. Fenomena ini dapat ditemukan di beberapa elite agama di Bireuen yang mulai menggunakan narasi "kami" versus "mereka" dalam mimbar dakwah untuk menjustifikasi pilihan politiknya. Sebagai pembanding, studi lokal Arif dan Mulyana (2020) memberikan gambaran bahwa partisipasi politik yang tinggi atau rendah sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial, pengalaman organisasi, dan afiliasi keluarga. Ini sejalan dengan temuan di Bireuen di mana jaringan pesantren, alumni dayah, serta hubungan kekerabatan turut membentuk basis dukungan politik, menjadikan ulama bukan sekadar aktor moral, tetapi juga mediator kekuasaan.

3.8 Diskusi Topik Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah perbedaan respons masyarakat terhadap keterlibatan ulama dalam politik berdasarkan demografi usia dan tingkat pendidikan. Kelompok masyarakat yang lebih tua umumnya tetap menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap ulama meskipun ada indikasi keberpihakan politik. Namun, generasi muda dan masyarakat terdidik mulai menunjukkan sikap kritis terhadap peran ulama yang dianggap tidak netral. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma keagamaan dalam masyarakat, dari yang bersifat "taqlid" atau mengikuti secara mutlak, menuju pola hubungan yang lebih dialogis dan kritis. Di sinilah tantangan baru muncul bagi ulama untuk menyesuaikan pendekatan mereka agar tetap relevan di mata publik, terutama generasi digital yang memiliki akses informasi lebih luas dan kecenderungan skeptis terhadap otoritas yang tidak transparan. Selain itu, adanya lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

dan qanun yang berlaku di Aceh seharusnya dapat menjadi pedoman normatif dalam menjaga netralitas ulama. Namun, kenyataannya, interpretasi terhadap lembaga ini masih bersifat subjektif. Sebagian ulama menempatkan MPU sebagai representasi moral kolektif, sementara lainnya cenderung mengedepankan pendapat pribadi atas nama agama, yang justru menambah ambiguitas peran di mata publik.

IV KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran ulama dalam politik di Kabupaten Bireuen berlangsung dalam dinamika yang kompleks dan penuh tantangan. Masyarakat mengharapkan ulama berfungsi sebagai penjaga nilai moral dan spiritual, namun dalam praktiknya, sebagian ulama terlibat dalam politik praktis yang menimbulkan konflik, ambiguitas, dan ketidakkonsistenan peran. Hal ini berdampak langsung terhadap persepsi masyarakat dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik, khususnya generasi muda yang memiliki pola pikir lebih rasional dan kritis. Oleh karena itu, menjaga kejelasan, konsistensi, dan netralitas peran menjadi krusial bagi keberlanjutan otoritas moral ulama. Ulama yang memilih untuk tetap berada di jalur independen dan menjaga jarak dari politik praktis terbukti lebih dihormati dan diterima oleh semua golongan, serta dapat memainkan fungsi sosial sebagai perekat dan penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, lingkup studi hanya terbatas pada Kabupaten Bireuen, sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Kondisi sosial, politik, dan keagamaan di daerah lain bisa memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua, data yang digunakan lebih banyak bersumber dari wawancara kualitatif dan belum dilengkapi dengan data kuantitatif untuk memperkuat kecenderungan persepsi publik secara lebih representatif. Ketiga, pendekatan dimensi peran yang digunakan masih bersifat umum dan belum menggali lebih jauh faktor-faktor sosiologis, psikologis, maupun institusional yang mempengaruhi pengambilan keputusan ulama dalam ranah politik.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis ke wilayah lain di Aceh atau daerah dengan karakteristik politik keagamaan yang berbeda untuk melihat pola peran ulama secara komparatif. Selain itu, pendekatan kuantitatif melalui survei opini publik dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ulama dalam politik secara lebih objektif dan terukur. Penelitian masa depan juga dapat menggali peran lembaga keulamaan dalam merumuskan etika politik keagamaan yang kontekstual, serta menganalisis dinamika relasi antara ulama dan aktor politik lokal secara lebih mendalam melalui pendekatan studi institusi dan jejaring kekuasaan (*power mapping*). Dengan begitu, kontribusi akademik dalam memahami peran keulamaan di era demokrasi modern dapat semakin diperkuat, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan tata kelola hubungan antara agama dan politik yang lebih sehat dan bermartabat.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerjasama selama pelaksanaan penelitian ini. Baik kepada pemerintah daerah, masyarakat, maupun semua informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi dengan penuh keterbukaan.

VI DAFTAR PUSTAKA

Abbas, T. (2007). A theory of Islamic political radicalism in Britain: Sociology, theology and international political economy. *Contemporary Islam, 1*(2), 109–122. https://doi.org/10.1007/s11562-007-0012-0

Alqarni, W., Saleh, R., Anggraini, T., Sulaksono, T., & Akhyar, M. N. (2024). The strategic role of local political parties in the legislative process Qanun for Sharia financial institutions in Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8*(3), 1881–1905. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.21802

Arif, M., & Mulyana, M. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara tahun 2018 (Studi kasus di Kecamatan Ternate Selatan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 46*(2), 381–395. https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1406

Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). Authoritarianism, democracy, Islamic movements and contestations of Islamic religious ideas in Indonesia. *Religions, 12*(8), 641. https://doi.org/10.3390/rel12080641

Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology, 12*, 67–92. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435

Fox, C. A., & Menchik, J. (2023). Islamic political parties and election campaigns in Indonesia. *Party Politics, 29*(4), 622–635. https://doi.org/10.1177/13540688221091656

Hamayotsu, K. (2011). Beyond faith and identity: Mobilizing Islamic youth in a democratic Indonesia. *The Pacific Review, 24*(2), 225–247. https://doi.org/10.1080/09512748.2011.560960

Hasyim, S. (2020). Fatwas and democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and rising conservatism in Indonesian Islam. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 8*(1), 21–35. https://doi.org/10.1017/trn.2019.13

Hidayah, A. R., Bajari, A., Hidayat, D. R., & Maryani, E. (2025). Shifting from religious populism to authoritarian populism: Two decades of identity politics dynamics in Indonesia. *Social Sciences, 14*(1), 45. https://doi.org/10.3390/socsci14010045

Karakoç, E., & Başkan, B. (2012). Religion in politics. *Comparative Political Studies, 45*(12), 1510–1541. https://doi.org/10.1177/0010414012453027

Lussier, D. N., & Ahnaf, M. I. (2024). Neutralizing the sacred space: Pre-election messages in a typical Indonesian city. *Politics and Religion, 17*(2), 341–361. https://doi.org/10.1017/S1755048324000117

Miichi, K. (2014). The role of religion and ethnicity in Jakarta's 2012 gubernatorial election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 33*(1), 55–83. https://doi.org/10.1177/186810341403300104

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Nurrahmi, F. (2022). Mediated representation of Sharia in Aceh: A hybrid approach to media frames. *Religions, 13*(9), 857. https://doi.org/10.3390/rel13090857

RRI. (2024, Februari 16). Partisipasi pemilu 2024 di Bireuen meningkat capai 82,84 persen. https://rri.co.id/lhokseumawe/politik/1323187/partisipasi-pemilu-2024-di-bireuen-meningkat-capai-82-84-persen

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik – legalistik – empirik – inovatif* (2nd ed.). ALFABETA.

Sumaktoyo, N. G. (2021). Ethnic and religious sentiments in Indonesian politics: Evidence from the 2017 Jakarta gubernatorial election. *Journal of East Asian Studies, 21*(1), 141–164. https://doi.org/10.1017/jea.2020.35

Sumaktoyo, N. G., Ottati, V., & Untoro, V. (2016). The paradoxical religiosity effect: Religion and politics in Indonesia and the United States. *Politics and Religion, 9*(3), 481–507. https://doi.org/10.1017/S175504831500053X

Widian, R., Satya, P. A. N. I. P., & Yazid, S. (2023). Religion in Indonesia's elections: An implementation of a populist strategy? *Politics and Religion, 16*(2), 351–373. https://doi.org/10.1017/S1755048321000195

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
1956